

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anwar, C., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2011.

Arba, H. M., *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2023.

Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Beatson, *et. al.*, *Administrative Law: Text and Materials*, Oxford University Press, UK, 2011.

Cane, Peter, *Administrative Law*, 5th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Carol, Alex, *Constitutional and Administrative Law*, 4th Edition, Edinburg Gate Pearson Education, Edinburg, 2007.

Efata, Ayik Christina, Retno Mawarini, dan Widyarini Indriasti, *Dekonstruksi Hukum Dalam Pengaturan Alih Fungsi Lahan Untuk Menjamin Kepastian Hukum*, UNTAG Press, Semarang, 2025.

- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Edisi Revisi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2022.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Sibuea, Hotman P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Cetakan IV, Erlangga, Jakarta, 2020.
- Sitorus, Oloan, dan H. M Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Soerodjo, Irawan, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Edisi Kedua, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2016.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041.

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.0201/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada delapan provinsi antara lain Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Keputusan ATR/BPN No. 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Tanah Nasional Tahun 2024.

Artikel Jurnal:

Burdatun, Baiq, “Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 452-466.

Erwahyuningrum, Rizki, Heru Kuswanto, dan Habib Adjie, “Problematisa Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Pelaku Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 329-336.

Hayuningtyas, Fendry Rizma, dan Harsanto Nursadi, “Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 276.

Irawan, B., “Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya Dan Faktor Determinan”, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2005.

Khusnul A'in, Aprilianita, dan Budi Ispriyarso, “Analisis Yuridis Akibat Perubahan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah

Terhadap Daerah Tertinggal (Studi Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur)”, Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 1-11.

Nurrahma, Alifia Fauziyah, Darsono dan Umi Barokah, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Non Sawah di Kabupaten Klaten”, *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 194.

Phuc, N. Q., A. C. M. Van Westen Dan A. Zoomers, “Agricultural Land for Urban Development: The Process of Land Conversion in Central Vietnam”, *Habitat International*, Vol. 41, No. 1, 2014, hlm. 1-7.

Prabowo, R., A. N. Bambang Dan S. Sudarno, “Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian”, *Mediagro: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol. 16, No. 2, 2020.

Reid, Jr., Charles D., “Judicial Precedent in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: A Commentary on Chancellor Kent’s Commentaries,” *Ave Maria Law Review*, Edisi No. 47, Vol. 5, 2007.

Riskanita, Dinda, dan Yeni Widowaty, “Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2019, hlm. 123-134.

Rusfandi, Anita, dan Meidy Triasavira, “Pencegahan Alih Fungsi Lahan Serta Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 93-106.

Soeharjono, Andy Rachmat, Aartje Tehupeiory, dan Wiwik Sri Widiarty, “Analisis Yuridis Kepastian Hukum Bagi Investor Terhadap Pemetaan Lahan Sawah

Dilindungi”, *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 5, Mei 2024, hlm. 2282-2298.

Suppan, Steve, “Challenges For Food Sovereignty”, *The Fletcher Forum Of Worlds Affairs*, Vol. 32, 2008, hlm. 111.

Yulia, Aris, “Pembaharuan Hukum Agraria Nasional yang Berkeadilan Sosial”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 1-7.

Zainudin, Putri, dan Didik Taryana, “Pemetaan Kesesuaian Penggunaan Lahan Sawah Dilindungi Terhadap RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043 Melalui SIG”, *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 12, No. 2, 2024.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir:

Amra, Fairuz Almayrah, “Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kawasan Sleman Timur Terhadap Perizinan Pembangunan”, *Skripsi*, Program Studi Diploma IV Pertanahan, Yogyakarta, 2024.

Husodo, Jadmiko Anom, “Adaptasi Konstitusional Dalam Pengaturan Kedaulatan Pangan Di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.

Internet:

Hussein, Achmad, detik.com, 21 Juli 2022, “Pemdes di Klaten Keluhkan Lahan Sawah Dilindungi: Investor Tak Jadi Masuk”,
<https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6191630/pemdes-di-klaten-keluhkan-lahan-sawah-dilindungi-investor-tak-jadi-masuk>, diakses pada Kamis 7 Juli 2025.